



## IMPELEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG PROGRAM PADAT KARYA DALAM RANGKA MENURUNKAN ANGKA KEMISKINAN DI KELURAHAN SETIAMANAH KECAMATAN CIMAH TENGGAH KOTA CIMAH

Salsabila Febriana Putri<sup>1)</sup>, Agustina Setiawan<sup>2)</sup>, Lukman Munawar Fauzi<sup>3)</sup>

1,2,3) Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia

### Abstrak

Judul artikel dalam penelitian ini adalah “**Impelementasi Kebijakan Tentang Program Padat Karya Dalam Rangka Menurunkan Angka Kemiskinan Di Kelurahan Setiamanah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi**”. Program padat karya merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang bertujuan menurunkan angka kemiskinan melalui penciptaan lapangan kerja sementara bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan program padat karya di Kelurahan Setiamanah. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi, pemerintah kecamatan dan kelurahan, pengurus RT/RW, serta masyarakat penerima manfaat, dilengkapi observasi lapangan dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan dilakukan secara berjenjang dari tingkat kota hingga RT/RW, namun tidak disertai pelatihan teknis sehingga peningkatan keterampilan peserta belum optimal. Kegiatan yang dilaksanakan umumnya bersifat fisik seperti perbaikan infrastruktur lingkungan, tetapi belum sepenuhnya berbasis potensi lokal. Pengelolaan dana tergolong transparan, meski keterbatasan anggaran berdampak pada pengurangan volume pekerjaan dan sarana kerja. Meskipun demikian, program ini berkontribusi dalam menambah pendapatan sementara, memperbaiki fasilitas umum, dan memberikan dampak positif terhadap penurunan angka kemiskinan di wilayah tersebut. Penelitian ini merekomendasikan adanya pelatihan teknis berbasis kebutuhan, peningkatan anggaran, dan perencanaan partisipatif agar program padat karya dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang berkelanjutan.

**Kata kunci:** Implementasi Kebijakan, Padat Karya, Pengurangan Kemiskinan, Kualitatif.

### Abstract

*The title of the thesis in this research is "Implementation of the Labor-Intensive Program Policy in Order to Reduce Poverty Rates in Setiamanah Village, Central Cimahi District, Cimahi City. The labor-intensive program is a government policy aimed at reducing poverty through the creation of temporary jobs for low-income communities. This study aims to analyze the implementation of the labor-intensive program policy in Setiamanah Village. The method used is descriptive qualitative with data collection techniques through in-depth interviews with the Cimahi City Manpower Office, sub-*

*district and village governments, RT/RW administrators, and beneficiary communities, supplemented by field observations and documentation studies. The study results indicate that policy implementation was carried out in stages from the city level down to the neighborhood unit (RT/RW), but without technical training, resulting in suboptimal skill development for participants. The activities implemented were generally physical, such as improving environmental infrastructure, but were not fully based on local potential. Fund management was relatively transparent, although budget constraints resulted in reduced work volume and work facilities. Nevertheless, the program contributed to increasing temporary income, improving public facilities, and positively reducing poverty in the region. This study recommends needs-based technical training, increased budgeting, and participatory planning to ensure the labor-intensive program delivers sustainable economic and social benefits.*

**Keywords:** Policy Implementation, Labor Intensive, Poverty Reduction, Qualitative.

## **PENDAHULUAN**

Padat karya merupakan salah satu program pemerintah yang dijalankan melalui Bappenas. Program ini mencakup berbagai jenis pekerjaan, khususnya di sektor konstruksi, seperti pemeliharaan saluran udara, perawatan taman lingkungan dan taman vertikal, perbaikan jalur pejalan kaki, pemeliharaan fasilitas olahraga, serta pengelolaan infrastruktur persampahan, dan jenis pekerjaan lainnya. Untuk mendorong peningkatan produktivitas, aksesibilitas, dan kesejahteraan bersama, Padat Karya merupakan upaya pemberdayaan masyarakat (termasuk pekerja miskin, pengangguran, dan kelompok rentan) melalui kegiatan pemeliharaan infrastruktur secara langsung serta aktivitas produktif lainnya yang mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal. Selain itu, Program Padat Karya juga terintegrasi dengan program lain, yaitu Pemantapan Masyarakat, yang berfokus pada percepatan pembangunan sosial dan ekonomi di kota-kota kecil, Camelle Aqila, Hasan Ismail, Eddy Wahyudi (2022).

Program padat karya telah dilaksanakan di Kota Cimahi sejak tahun 2023 dan berlanjut hingga 2025. Pada tahun 2024, kegiatan ini dimulai di Kelurahan Pasirkaliki, Kecamatan Cimahi Utara, dan kemudian diperluas ke 15 kelurahan lainnya di seluruh Kota Cimahi hingga ke Kelurahan Setiamanah. Program padat karya di Kelurahan Setiamanah, Kota Cimahi, mulai dilaksanakan pada pertengahan Juli 2023. Kegiatan ini ditandai dengan pelaksanaan di lapangan Kademangan pada Jumat, 21 Juli 2023, yang dihadiri oleh Penjabat Wali Kota Cimahi, H. Dikdik S. Nugrahawan, serta pejabat terkait lainnya pada saat itu, Hardiana (2024).

Kelurahan Setiamanah yang terletak di Kecamatan Cimahi Tengah memiliki 18 Rukun Warga (RW), dan 81 Rukun Tetangga (RT). Seluruh Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) di Kelurahan Setiamanah, Kota Cimahi, telah melaksanakan program padat karya. Hal ini dikonfirmasi melalui kegiatan "Gebyar Padat Karya" yang dirangkaikan dengan Kirab Kemerdekaan RI ke-79 pada 8 September 2024. Acara tersebut diselenggarakan sebagai bentuk syukur atas selesainya pelaksanaan program padat karya di seluruh RW di Kelurahan Setiamanah. Upah harian pekerja berkisar antara Rp70.000 hingga Rp80.000, tergantung pada tugas yang dilakukan, PPID Kota Cimahi (2024). Di Kota Cimahi sendiri program Padat Karya untuk anggaran tahun 2024, baru digulirkan pada tanggal 27 Juli 2024.

Program Padat Karya dipilih sebagai solusi di Kelurahan Setiamanah, Kecamatan Cimahi Tengah, didasarkan pada beberapa faktor krusial yang terkait dengan karakteristik demografis dan kebutuhan pembangunan wilayah setempat. Pertama, data dari Kelurahan Setiamanah menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai buruh harian, pedagang kecil, atau pekerja serabutan dengan penghasilan tidak tetap yang rentan terhadap fluktuasi ekonomi. Kedua, Kelurahan Setiamanah memiliki sejumlah proyek infrastruktur dan pembangunan yang membutuhkan tenaga kerja lokal, seperti perbaikan jalan lingkungan, drainase, fasilitas umum, atau program perumahan sederhana.

Namun, pada implementasinya program padat karya belum berjalan secara optimal dikarenakan permasalahan yang terjadi seperti, Anggaran yang terbatas seringkali menjadi kendala utama dalam pelaksanaan program padat karya. Dana yang dialokasikan untuk program ini sering kali tidak mencukupi untuk mencapai dampak yang signifikan. Keterbatasan anggaran juga bisa berdampak pada penyediaan alat dan bahan yang diperlukan, serta pembayaran upah yang layak bagi pekerja, serta tidak ada pelatihan teknis yang diberikan kepada para peserta sebelum mereka terlibat dalam kegiatan. Hal ini menjadi perhatian serius mengingat mayoritas peserta berasal dari latar belakang yang tidak memiliki keterampilan teknis yang memadai,

terutama untuk jenis pekerjaan fisik seperti pengaspalan, perbaikan saluran air, dan pembangunan infrastruktur lingkungan lainnya.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan menggambarkan secara mendalam implementasi kebijakan program padat karya dalam menurunkan angka kemiskinan di Kelurahan Setiamanah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci, yakni pihak Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi, aparat kecamatan, perangkat kelurahan, ketua RT/RW, serta masyarakat penerima manfaat program, yang dilengkapi dengan observasi langsung dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan mengikuti tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sesuai model Miles dan Huberman, dengan landasan teori implementasi kebijakan menurut Abdullah dan Smith yang menitikberatkan pada tiga unsur utama, yaitu unsur pelaksana, adanya program yang akan dilaksanakan, dan kelompok sasaran sebagai penerima manfaat. Keabsahan data diuji dengan teknik triangulasi sumber dan metode untuk memastikan validitas serta reliabilitas temuan penelitian.

## **PEMBAHASAN**

Implementasi kebijakan pemerintah terkait pelaksanaan program padat karya di Kelurahan Setiamanah bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja sementara, meningkatkan pendapatan masyarakat miskin, serta memperbaiki kondisi lingkungan dan infrastruktur. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan perbaikan fasilitas umum, seperti pembersihan saluran air, perbaikan jalan lingkungan, dan penghijauan. Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan pihak kelurahan, perangkat RT/RW, serta masyarakat peserta program, implementasi kebijakan ini belum berjalan optimal.

Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Kebijakan Tentang Program Padat Karya Dalam Rangka Menurunkan Angka Kemiskinan Di Kelurahan Setiamanah Kecamatan Cimahi Tengah Kota

Cimahi, peneliti menggunakan dimensi dan aspek dari Teori Implementasi Kebijakan Unsur-Unsur Mutlak Menurut Abdullah dan Smith (dalam Tachjan 2006: 27-36)

a) Unsur Pelaksana

Unsur pelaksana mencakup pihak-pihak yang bertanggung jawab secara langsung dalam menjalankan kebijakan, baik itu institusi pemerintah, pelaksana teknis, maupun aparatur di tingkat lokal yang terlibat dalam operasional program. Pelaksana kebijakan tidak hanya menjalankan instruksi dari atas, tetapi juga memiliki peran penting dalam menafsirkan kebijakan, menyusun strategi pelaksanaan, serta mengelola sumber daya dan koordinasi lintas sektor. Karena itu, kualitas dan kapabilitas unsur pelaksana sangat berpengaruh terhadap tercapainya tujuan kebijakan secara efektif dan efisien. Dalam konteks implementasi kebijakan program padat karya di Kelurahan Setiamanah, unsur pelaksana utamanya adalah pemerintah kelurahan yang berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Kota Cimahi, serta pihak RW/RT setempat yang membantu dalam pelaksanaan teknis di lingkungan masing-masing.

Penentuan Tujuan, Hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan Program Padat Karya di Kelurahan Setiamanah telah dipahami secara selaras oleh seluruh pelaksana, mulai dari Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi, pemerintah kecamatan, kelurahan, hingga RT/RW dan masyarakat peserta. Tujuan utamanya adalah mengurangi pengangguran, memberikan penghasilan tambahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, serta meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan melalui kegiatan fisik yang bermanfaat. Meskipun demikian, baik pelaksana lokal maupun peserta program mengharapkan agar tujuan program tidak hanya berhenti pada penyediaan pekerjaan sementara, tetapi juga mencakup pemberdayaan ekonomi jangka panjang melalui pelatihan keterampilan dan peluang usaha yang berkelanjutan.

**Perencanaan dan Penyusunan Program,** Perencanaan program disusun secara terstruktur dan hierarkis, dengan mekanisme top-

down dari Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi hingga ke tingkat RT/RW. DISNAKER menyusun rencana berdasarkan data kemiskinan dan pengangguran, kemudian berkoordinasi dengan kecamatan dan kelurahan untuk menyesuaikan dengan kondisi lokal. RT dan RW berperan penting dalam menjaring aspirasi, mendata calon peserta, serta mengusulkan jenis kegiatan sesuai kebutuhan lingkungan. Meskipun pendekatan partisipatif telah dilakukan, hasil observasi menunjukkan adanya tantangan teknis di lapangan, seperti keterbatasan anggaran, peralatan kerja, dan minimnya sosialisasi proses perencanaan kepada warga, yang menyebabkan partisipasi masyarakat cenderung pasif dan bersifat instruktif.

**Pengawasan dan Penilaian,** Pengawasan program dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat kota melalui DISNAKER, dilanjutkan oleh kecamatan, kelurahan, hingga RT/RW sebagai pengawas langsung di lapangan. Pengawasan umumnya berfokus pada kehadiran peserta, ketertiban pelaksanaan, serta kesesuaian teknis dengan rencana. Namun, hasil penilaian program lebih banyak bersifat administratif dan teknis, belum menyentuh evaluasi mendalam terhadap dampak program pada kesejahteraan ekonomi masyarakat. Penyampaian hasil pengawasan kepada warga masih terbatas, umumnya melalui komunikasi lisan dan belum dalam bentuk laporan terbuka. Minimnya transparansi dan keterlibatan peserta dalam evaluasi menjadi tantangan yang perlu diperbaiki agar tercipta akuntabilitas, keberlanjutan, dan rasa memiliki terhadap program di tingkat masyarakat.

b) Unsur Program yang akan dilaksanakan

Unsur program yang dilaksanakan merujuk pada bentuk nyata dari kebijakan yang diterapkan di lapangan. Unsur ini berkaitan dengan bagaimana suatu kebijakan dikonversi menjadi rangkaian kegiatan yang operasional, teknis, dan dapat diakses langsung oleh masyarakat sebagai penerima manfaat. Unsur ini tercermin dalam kegiatan yang

dirancang untuk memberdayakan masyarakat berpenghasilan rendah melalui pemberian pekerjaan bersifat sementara

**Sasaran yang hendak dicapai,** Pelaksanaan program padat karya di Kelurahan Setiamanah difokuskan pada masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi, seperti pengangguran, pekerja informal, janda kepala keluarga, dan warga yang kehilangan penghasilan. Penentuan sasaran dilakukan secara berjenjang mulai dari pendataan oleh RT, verifikasi RW, hingga penetapan di tingkat kelurahan, dengan mempertimbangkan masukan tokoh masyarakat. Pendekatan yang digunakan tidak hanya berorientasi pada bantuan individu, tetapi juga diarahkan untuk memberikan manfaat lingkungan, seperti peningkatan kebersihan dan kenyamanan wilayah. Hasil observasi menunjukkan bahwa mayoritas peserta memang berasal dari kelompok ekonomi lemah, dan lokasi kegiatan memberikan dampak positif bagi lingkungan.

**Jangka waktu yang diperlukan,** program ini berjalan antara 14 hingga 30 hari kerja, disesuaikan dengan jenis kegiatan, kemampuan fisik peserta, dan anggaran yang tersedia. Di Kelurahan Setiamanah, pelaksanaan biasanya berlangsung selama satu bulan, dengan pembagian waktu per RW dan mayoritas pekerjaan dilakukan pada akhir pekan. Meski durasi ini efektif sebagai langkah penanggulangan kemiskinan jangka pendek, sebagian warga menginginkan waktu yang lebih panjang agar penghasilan yang diperoleh lebih signifikan.

**Besarnya Biaya,** Berdasarkan hasil penelitian, pengelolaan dana program padat karya di Kelurahan Setiamanah telah memiliki mekanisme yang jelas, transparan, dan akuntabel. Dana bersumber dari APBD Kota Cimahi, disalurkan melalui kelurahan atau kelompok kerja, dan diawasi secara berlapis oleh Dinas Tenaga Kerja, kecamatan, kelurahan, serta RT/RW. Proses pertanggungjawaban dilakukan melalui laporan resmi dan monitoring lapangan untuk memastikan dana digunakan sesuai peruntukan, terutama pada upah tenaga kerja dan pembelian material. Namun, di tingkat pelaksanaan, anggaran yang tersedia sering kali tidak mencukupi kebutuhan riil. Kondisi ini

mendorong adanya swadaya masyarakat, baik berupa konsumsi, tenaga tambahan, maupun pemakaian peralatan pribadi, guna menutup kekurangan yang ada. Keterbatasan anggaran berdampak langsung pada kualitas dan ketepatan waktu pekerjaan, terlihat dari penggunaan bahan menengah, penyesuaian spesifikasi, serta perlambatan proses akibat keterbatasan alat dan material. Fenomena ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara perencanaan anggaran dengan kebutuhan aktual di lapangan. Oleh karena itu, peneliti merekomendasikan evaluasi menyeluruh terhadap perhitungan RAB, penambahan alokasi anggaran, atau penyediaan dana cadangan agar pelaksanaan program lebih optimal.

**Jenis-jenis kegiatan yang akan dilaksanakan,** Jenis kegiatan yang dilaksanakan meliputi pembersihan saluran air, pengecatan fasilitas umum, perbaikan jalan lingkungan, penataan taman, dan normalisasi drainase. Penentuan jenis kegiatan dilakukan melalui musyawarah kelurahan dengan melibatkan RT, RW, dan tokoh masyarakat. Meskipun kegiatan sudah sesuai dengan kebutuhan lingkungan, minimnya pelatihan teknis membuat mutu hasil pekerjaan bervariasi dan cenderung cepat rusak. Peserta hanya menerima pengarahan umum sebelum mulai bekerja tanpa pembekalan keterampilan yang memadai.

**Tenaga kerja yang dibutuhkan,** Tenaga kerja direkrut dari warga setempat dengan kriteria pengangguran, berpenghasilan rendah, terdampak PHK, atau belum pernah menerima bantuan serupa. Usia peserta dibatasi antara 17 hingga 60 tahun, dengan peran khusus bagi ibu-ibu, seperti menyiapkan konsumsi dan membantu kegiatan sosial. Mekanisme seleksi dilakukan secara berjenjang melalui RT dan RW sebelum diverifikasi di kelurahan, dengan prinsip pemerataan agar peserta berbeda setiap tahun. Observasi menunjukkan bahwa mayoritas tenaga kerja adalah warga lokal yang memenuhi kriteria tersebut, dan pelaksanaan di lapangan berjalan cukup baik meski tanpa pelatihan formal.

c) Kelompok Sasaran

Unsur kelompok sasaran dalam program padat karya di Kelurahan Setiamanah merujuk pada warga miskin, pengangguran, dan mereka yang belum menerima bantuan sosial lainnya. Jumlah peserta disesuaikan dengan anggaran dan jenis kegiatan yang dilaksanakan, sehingga seleksi dilakukan secara ketat oleh pihak kelurahan bersama RT dan RW. Meskipun tidak semua warga dapat terlibat, keikutsertaan kelompok sasaran terbukti memberi dampak ekonomi positif. Bahkan, semangat gotong royong warga mendorong partisipasi swadaya bagi mereka yang tidak terakomodasi dalam program resmi.

**Besaran Kelompok sasaran,** Di Kelurahan Setiamanah, penentuan besaran kelompok sasaran program padat karya dilakukan dengan mempertimbangkan kapasitas anggaran dan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan. Karena anggaran terbatas, proses seleksi peserta dilakukan secara hati-hati melalui koordinasi antara kecamatan, kelurahan, serta ketua RT dan RW. Di tingkat Kecamatan Cimahi Tengah, jumlah kelompok sasaran dibagi ke enam kelurahan dengan rata-rata 10–15 orang per kelompok. Sementara di Kelurahan Setiamanah, kebijakan yang diambil adalah melibatkan seluruh RW dan RT tanpa memilah secara ketat, sehingga semua warga memiliki kesempatan berpartisipasi. Berdasarkan keterangan dari pihak kelurahan dan RW, setiap kelompok kerja di lingkungan terdiri dari sekitar sepuluh orang yang dipilih berdasarkan kondisi ekonomi, khususnya mereka yang belum memiliki pekerjaan tetap atau berpenghasilan rendah. Distribusi peserta dilakukan secara merata di seluruh RT dan RW, menunjukkan adanya pemerataan yang direncanakan. Di lapangan, interaksi antaranggota kelompok terlihat sinergis, dengan semangat gotong royong yang tinggi sebagai modal sosial utama dalam pelaksanaan kegiatan. Hasil analisis peneliti menunjukkan bahwa besaran kelompok sasaran bukan hanya ditentukan oleh ketersediaan anggaran, tetapi juga merupakan hasil kompromi antara pemerataan wilayah dan selektivitas penerima manfaat. Kebijakan inklusif di kelurahan memastikan partisipasi dari seluruh wilayah, sementara di tingkat RW tetap ada penyesuaian

berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat. Pendekatan ini mampu menyeimbangkan antara pemerataan dan efektivitas penyaluran manfaat, meskipun keterbatasan anggaran tetap menjadi penghambat perluasan cakupan peserta. Keberhasilan penentuan kelompok sasaran sangat bergantung pada koordinasi lintas tingkat pemerintahan dan kepekaan aparat lokal dalam mengenali kondisi sosial-ekonomi warganya.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dan observasi, implementasi Program Padat Karya di Kelurahan Setiamanah, Kecamatan Cimahi Tengah, telah berjalan sesuai kerangka kebijakan yang ditetapkan. Program ini berhasil memberikan lapangan kerja sementara bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pengangguran, dan warga terdampak kemiskinan, serta berkontribusi pada perbaikan infrastruktur lingkungan dan penguatan partisipasi masyarakat. Koordinasi antar unsur pelaksana, mulai dari Dinas Tenaga Kerja, kecamatan, kelurahan, hingga RT/RW, berjalan cukup baik dalam penentuan sasaran dan pengawasan kegiatan. Namun, masih terdapat kelemahan pada perencanaan teknis, pembagian tanggung jawab yang belum detail, serta belum adanya evaluasi pascaprogram secara menyeluruh. Keterbatasan anggaran menjadi tantangan utama yang memengaruhi teknis pelaksanaan di lapangan, seperti pengurangan ketebalan aspal, keterbatasan material, dan minimnya peralatan kerja. Selain itu, ketiadaan pelatihan teknis bagi peserta sebelum pelaksanaan menyebabkan proses kerja kurang efisien dan hasil pekerjaan berpotensi tidak optimal. Dampak program pun cenderung bersifat sementara, belum memberikan peningkatan keterampilan yang signifikan untuk pengentasan kemiskinan jangka panjang. Ke depan, dibutuhkan peningkatan alokasi anggaran, perencanaan teknis yang lebih matang, serta integrasi pelatihan kerja sebelum pelaksanaan agar program ini dapat berfungsi sebagai solusi berkelanjutan dan sarana pemberdayaan masyarakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Camelle Aqila, Hasan Ismail, Eddy Wahyudi. (2022). EFEKTIVITAS KINERJA PELAYANANKELURAHAN WONOKUSUMOTERHADAPPROGRAM PADAT KARYADISPENDUKCAPIL SURABAYA. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 50.
- PPID Kota Cimahi. (2024, Juli 29). *Pemkot Cimahi Sediakan Lapangan Kerja Lewat Program Padat Karya*. Retrieved from

<https://ppid.cimahikota.go.id/artikel/kelurahan-pasirkaliki-pemkot-cimahi-sediakan-lapangan-kerja-lewat-program-padat-karya>

Hasibuan, M. S. (2003). *Organisasi dan Motivasi : Dasar Peningkatan Produktivitas*. Jakarta: Bumi Aksara.